

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENDATAAN KELUARGA DI KOTA
PEKANBARU OLEH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PERWAKILAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2015**

Oleh :

Muhammad Affandi

Email : muhammadaffandii@yahoo.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272

Abstract

Family Data Collection in 2015 is the primary data collection activities on the data of Population, Family Planning Data, Data Family Development (KKBPK) in Pekanbaru conducted by the National Population and Family Planning (BKKBN) Representatives of the Province of Riau. For the expected availability of the database, it must be ensured all families recorded. Implementation of this program up and running no less effective because of the level of community participation Pekanbaru City is still low and still many shortcomings of the Agency of National Population and Family Planning (BKKBN) Representatives of Riau Province as program implementers.

This study used a qualitative approach, this kind of research is a descriptive study. The focus of research is the effective implementation of the program and community participation. Informant in this study is the Head of Public Affairs and Public Relations of the Agency of National Population and Family Planning (BKKBN) Representatives of the Province of Riau, Chairman Validator of the Family Data Collection Data 2015, and 12 family heads. Data collection techniques in this study using observation, interviews . Data analysis techniques used in this research is descriptive analysis techniques.

The results of this study show implementation of the program has not been effective, coupled with the apathy of people in Pekanbaru is still high. recommendation for this research is reassure the public about the active participation in the government program, communication between the government and the public, or otherwise to enable the development of society and the government should more leverage in implementing the program in order to run effectively and optimally.

Keywords: Family Data Collection In 2015, Effectiveness, Public Participation

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Namun, tidak akan tepat sasaran bila suatu perencanaan pembangunan tidak dilandasi dari sumber data yang valid dan akurat. Hampir dapat dipastikan bahwa pembangunan yang dijalankan tidak akan membawa perubahan menuju kondisi yang diharapkan. Suatu pembangunan dinyatakan berhasil, jika indikator target yang ditetapkan berasal dari sumber data yang akurat. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan 2 keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Ardian:1996).

Pendataan Keluarga merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah baik Nasional maupun Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pendataan Keluarga ini oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 diperintahkan agar setiap 5 tahun dilakukan secara serentak dan menyeluruh melalui kunjungan dari rumah ke rumah dan dilakukan oleh petugas Pemerintah bersama kader-kader relawan dari masyarakat setempat. Kemudian di tahun-tahun berikutnya dilakukan proses pemutakhiran data secara berkelanjutan yang juga dilakukan oleh petugas Pemerintah bersama kader-kader relawan dari masyarakat. Sesuai dengan perintah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang telah

disebutkan, adalah saat yang tepat bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada Tahun 2015 mendatang melakukan pendataan keluarga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan harapan hasil pendataan keluarga ini bisa sekaligus mendukung berbagai program yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi.

Untuk tersedianya database yang diharapkan, maka harus dipastikan semua keluarga terdata. Persoalannya, mendata seluruh keluarga di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Beragam tantangan teknis maupun nonteknis dapat saja terjadi. Terlebih, pendataan dilakukan secara *door to door*. Hal ini dilakukan sebab dari sebuah keluarga pembangunan dimulai. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (Landis 1989; BKKBN 1992).

Tahapan keluarga sejahtera ini dibagi atas 5 tahapan dimulai dari Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang paling kurang beruntung karena belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada aspek pangan, belum semua anggota keluarga bisa makan 2 kali sehari. Pada aspek pakaian, belum setiap anggota keluarga mampu

membeli 1 stel baju baru dalam 1 tahun. Untuk aspek papan, kondisi rumahnya belum layak huni dalam arti atap, lantai dan dindingnya belum aman melindungi penghuninya dari perubahan cuaca, musim dan binatang berbahaya. Pada aspek kesehatan, kalau ada anggota keluarga sakit belum bisa dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan modern yang paling primer. Untuk aspek pendidikan, anak usia sekolah belum bisa disekolahkan sesuai dengan ketentuan wajib belajar. Pada tahapan yang lebih tinggi, Keluarga Sejahtera I, untuk pangan misalnya, setelah setiap anggota keluarga bisa makan minimal 2 kali sehari, mereka juga mulai memperoleh makanan bergizi, minimal ada lauk pauk (daging, ikan, telur dan yang setara) sekali seminggu. Untuk pakaian mereka memiliki pakaian berbeda untuk kegiatan yang berbeda. Sedangkan untuk papan, luas lantai minimal 8 m² per anggota keluarga. Tahap yang paling atas, Keluarga Sejahtera III plus adalah yang telah mencapai tahap aktualisasi diri dengan indikasi ada anggota keluarga yang menjadi pengurus atau aktivis organisasi kemasyarakatan dan secara teratur memberi sumbangan materil bagi pembangunan masyarakat.

Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau ini juga ikut melaksanakan program yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Riau, program ini dilaksanakan sejak bulan Mei 2015. Dari data sensus penduduk tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Provinsi Riau mencapai 5.530.311 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 3,59 persen per tahun, yang artinya laju pertumbuhan penduduk Riau jauh berada di atas rata-rata nasional yang hanya 1,49 persen (BPS, 2010). Pada tahun 2014, jumlah anggota jiwa per kepala keluarga di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

Tabel 1
Rata-Rata Anggota Jiwa Per Kepala Keluarga Di Kota Pekanbaru Dirinci Per Kecamatan Keadaan Akhir Tahun

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA
TAMPAN	194.331	47.839	4,06
PAYUNG SEKAKI	99.170	23.013	4,31
BUKIT RAYA	106.161	25.037	4,24
MARPOYAN DAMAI	141.569	33.645	4,21
TENAYAN RAYA	142.519	32.634	4,37
LIMA PULUH	43.928	10.523	4,18
SAIL	22.956	5.992	3,83
PEKANBARU KOTA	27.059	6.330	4,27
SUKAJADI	49.336	12.659	3,90
SENAPELAN	38.183	8.943	4,27
RUMBAI	73.231	17.029	4,30
RUMBAI PESISIR	72.930	17.224	4,23
JUMLAH	1.011.467	240.888	4,20

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru

*pertumbuhan penduduk tahun 2015 sebesar 7,43 persen. Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 adalah 1.011.467 jiwa dengan 240.888 rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 orang/jiwa. Dengan menimbang banyaknya penduduk di Kota Pekanbaru ini, mustahil bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat untuk bekerja sendiri, terlebih setelah kewenangan urusan KB di kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah daerah. Nantinya hasil Pendataan Keluarga ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat sendiri. Bukan tanpa alasan pastinya bahwa Pendataan Keluarga harus dibangun dalam sebuah kolaborasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pemerintah daerah. Seperti yang telah dibahas, amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 49 ayat 1 menyebutkan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.

Program Pendataan Keluarga dilakukan pada bulan Mei tahun 2015 di Kota Pekanbaru oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Riau dan telah selesai dilaksanakan. Berikut merupakan data masuk Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 per Kabupaten/Kota:

Tabel 2
Data Masuk Perindividu Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Per Kabupaten

KABUPATEN/KOTA	DATA MASUK
BENGKALIS	78.707
INDRAGIRI HILIR	51.873
INDRAGIRI HULU	69.420
KAMPAR	83.662
KEPULAUAN MERANTI	9.528
KUANTAN SINGING	87.378
PELALAWAN	101.812
ROKAN HILIR	17.620
ROKAN HULU	42.375
SIAK	189.761
KOTA DUMAI	129.543
KOTA PEKANBARU	439.980
JUMLAH	1.301.659

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Riau

Dari 1.011.467 penduduk kota Pekanbaru, hanya 439.980 data yang masuk pada Program Pendataan Keluarga Tahun 2015. Dapat dilihat bahwa lebih dari 50% penduduk Kota Pekanbaru masih apatis atau masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah terhadap program yang dicanangkan pemerintah. Padahal, kesuksesan Pendataan Keluarga justru ada pada keluarga itu sendiri. Perlu partisipasi aktif masyarakat guna memastikan keluarga mereka terdata dan sebaliknya petugas pendata diterima dengan baik kedatangannya. Maka sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan, peran masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama

dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 BKKBN Perwakilan Provinsi Riau

KAB/KOTA	KELUARGA				
	AKAN DIDATA	TERDATA	PERSEN (%) TERHADAP KEPALA KELUARGA	VALIDASI/ ENTRY	TERUNGGAH
KAMPAR	186434	161780	87%	161780	12043
INDRAGIRI HULU	92581	89038	96%	89038	4452
BENGKALIS	127808	116688	91%	116688	78707
INDRAGIRI HILIR	175571	106437	61%	106437	17188
PELALAWAN	88408	60781	69%	60781	59510
ROKAN HULU	105585	86052	82%	86052	22728
ROKAN HILIR	144585	77026	53%	77026	711
SIAK	94771	66906	71%	66906	7289
KUANTAN SINGINGI	81.590	71146	87%	71146	67955
KEP MERANTI	61680	45362	74%	45362	45362
KOTA PEKANBARU	201205	156050	78%	156050	148374
KOTA DUMAI	63653	63527	100%	63527	63527
JUMLAH	1433822	1100461	77%	1100461	527846

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Riau

Tabel di atas menunjukkan secara umum pelaksanaan Program Pendataan Keluarga 2015 di Provinsi Riau. Terdapat 23% masyarakat Riau yang tidak terdata. Tidak terdata disini dapat terjadi dikarenakan data yang telah diambil ada, namun tergolong data yang kotor sehingga tidak lolos setelah divalidasi.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Program Pendataan Keluarga di Kota Pekanbaru Oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015."

KERANGKA TEORI

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara. Menurut Hannan dan Freeman (1977), dalam *New Perspective on Organizational Effectiveness*, efektivitas sebagai “*a concept of applications and engineering but not of abstracts theory and research*”. Oleh karena efektivitas merujuk kepada kemampuan dalam mencapai tujuan secara memadai dengan melaksanakan pekerjaan dengan benar (Stoner dan Freeman, 1996). Menurut Handoko efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan pekerjaan yang benar (Handoko, 2000). Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Martani Huseini (1987) yang dikutip oleh Nurdin dalam karya ilmiahnya bahwa: “Pendekatan pencapaian tujuan menggunakan tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi”. (Nurdin, 2004).

Menurut *Manpower Service Commission* (MSC) sebagaimana dikutip oleh Weda dalam karya ilmiahnya, bahwa efektivitas didefinisikan sebagai

pengukuran terhadap ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Weda, 2006). Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika *output*-nya sama atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan jika tidak sesuai, maka kegiatan tersebut tidak efektif (Suhana, 1998). Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* menjelaskan efektivitas dengan mengatakan bahwa “*That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian dkk, 1991). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi semakin besar, berarti semakin besar pula efektivitasnya. Definisi lain menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005).

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan efektivitas organisasi. Hal ini karena didasari adanya keterkaitan antara pendekatan efektivitas dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Salah satu pendekatan kedua konsep tersebut melihat dari sudut pandang *input-proses-output* sehingga hakikat efektivitas terkait dengan organisasi.

Keberhasilan organisasi dalam menjalankan programnya diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Steers (1977), Hal yang diperlukan untuk mencapai efektivitas organisasi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Produksi (*production*)
- b. Efisiensi (*efficiency*)

- c. Kepuasan (*satisfaction*)
- d. Adaptasi (*adaptiveness*)
- e. Perkembangan (*development*)

Berdasarkan pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program Pendataan Keluarga Tahun 2015 pada penelitian ini, diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Pemahaman program
- b. Ketepatan sasaran
- c. Ketepatan waktu
- d. Tercapainya target
- e. Tercapainya tujuan
- f. Perubahan nyata

Tujuan akhir yang diharapkan dari program Pendataan Keluarga Tahun 2015 meliputi Kemampuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Pendataan Keluarga Tahun 2015, tersedianya database yang diharapkan serta kemampuan meningkatkan keluarga sejahtera.

Sehubungan dari penjelasan tersebut maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus perencanaan, proses atau pelaksanaan, hasil dan peran fasilitator yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dampak dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (dalam Swedianti, 2011) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja

sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pada pelaksanaan program.

Masyarakat merupakan objek dari pembangunan dan sekaligus menjadi subjek pembangunan. Maka pembangunan itu memerlukan partisipasi dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak akan tercapai atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Oleh karena itu masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan.

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (dalam Swedianti, 2011) membagi partisipasi ke dalam beberapa jenis tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Efektivitas organisasi tidak lain merupakan fungsi dari keefektifan individu dan kelompok. Hal ini didasarkan bahwa setiap organisasi terdiri atas

individu dan kelompok. Terdapat tiga perspektif dalam efektivitas, yaitu:

1. Efektivitas dari perspektif individu.
2. Efektivitas dari perspektif kelompok.
3. Efektivitas dari perspektif organisasi.
Hal tersebut mengandung arti bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yang merupakan kesatuan yang saling melengkapi.

Efektivitas perspektif individu berada pada tingkat awal untuk menuju efektivitas kelompok ataupun efektivitas organisasi. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input-proses-output* yang selanjutnya diikuti oleh lingkungan. Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas Pertama, pendekatan sasaran (*goal approach*). Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu identifikasi sasaran organisasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Pendekatan sasaran memusatkan perhatian pada aspek *output*, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan. Secara sederhana *output* atau dapat disebut sebagai keluaran adalah hasil dari perubahan yang dilakukan terhadap data atau informasi yang diberikan kepada *input*. Terdapat juga dua jenis sasaran yaitu *operative goals* (sasaran aktual) dan *official goals* (sasaran resmi). Sasaran resmi bukanlah salah satu tujuan atau sasaran yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah tindakan dan pengukuran kinerja. Sasaran aktual dianggap sebagai sasaran yang menunjukkan apa yang sebenarnya diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai (Lubis dan Huseini, 1989).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-

permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program masyarakatnya. Institusi hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

- a. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- b. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

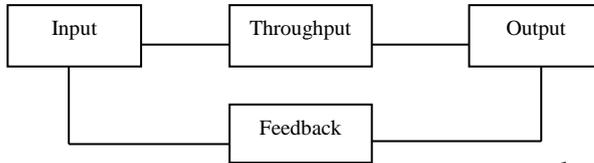
Menurut Richard M. Steers, efektivitas partisipasi suatu organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Steers (1986) cara yang terbaik untuk meneliti suatu efektivitas partisipasi adalah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, antara lain :

- a. Paham mengenai optimalisasi tujuan, efektivitas dinilai menurut ukuran berapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
- b. Perspektif sistematika, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian suatu tujuan organisasi.
- c. Tekanan pada suatu tingkah manusia dalam susunan organisasi tingkah laku individu dan kelompok dalam menentukan kelancaran tercapainya tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut yang terdiri

dari komponen dasar yaitu *input*, *throughput* dan *output* dalam pencapaian tujuan.

Gambar 1 Pola Dasar Sebuah Model Efektifitas



Sumber : Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, 1986

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa adanya keterpaduan antara komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur efektivitas Sutarto (2000) yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi:

- a. *Input*, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang, energy, orang dan benda.
- b. *Throughput*, yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi output.
- c. *Output*, yaitu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang (fisik), maupun jasa (pelayanan).

Menurut Munir (2004), unsur- unsur Efektivitas Partisipasi meliputi:

- a. *Input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
- b. *Conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
- c. *Output* (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka konteks penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pendataan keluarga yang menggunakan perspektif sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. *Input* (masukan)
Input yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini adalah data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang disurvei oleh kader-kader dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau.

- b. *Throughput* (proses)
Yakni merupakan proses pengolahan *Input* menjadi *output*. Proses penelitian yang akan berlangsung adalah proses pembuatan kebijakan yang akan diimplementasikan terhadap seluruh keluarga yang telah terdata.

- c. *Output* (keluaran)
Merupakan hasil dari pekerjaan atau dari proses pemungutan. Pada penelitian ini maka *output* atau keluaran yang dihasilkan proses ini adalah pencapaian realisasi dari target kebijakan yang ditetapkan. Efektivitas *output* ini dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencapai tujuan.

Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

- a. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
- c. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

- d. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
 - e. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*)
- Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :
- a. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
 - b. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
 - c. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
 - d. Menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
 - e. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam situasi seperti ini maka metode penelitian kualitatif dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Institusi terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau beserta yang menangani dan bertanggung jawab mengenai program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ketersediaan data dan lokasi yang relevan dengan penulis.

Informan Penelitian

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang bagaimana. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu, agar langsung bisa memilih informan yang benar-benar tahu dan paham tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Umum dan Humas BKKBN Provinsi Riau	1 Orang
2	Ketua Validator data PK 2015	1 Orang
3	Kepala Keluarga	12 Orang
	Total	14 Orang

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, peran informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kabid Umum dan Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau Bapak Ronaldi Inand, S.Sos memberikan gambaran umum tentang program dan berbagai data yang akan digunakan dalam penelitian ini.
2. Ketua Validator Pendataan Keluarga Tahun 2015 M. Fikhri Johar memberikan berbagai keterangan tentang bentuk data-data yang masuk ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Riau dari angket yang diisi masyarakat.
3. Kepala Keluarga yang di data dan diwawancarai dipilih berdasarkan domisili keluarga tersebut yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, Kepala Keluarga tersebut dipilih berdasarkan hubungan dengan penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Pendataan Keluarga di Kota Pekanbaru Oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, yaitu tentang :

Pelaksanaan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi di daerah, program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru ini dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang tersedia adalah sebagaimana tertuang dalam instrumen yang digunakan, meliputi data kependudukan, keluarga berencana, dan tahapan keluarga sejahtera. Untuk dapat dimanfaatkannya data dan informasi hasil Pendataan Keluarga, maka kualitas hasil Pendataan Keluarga harus menjadi perhatian bersama, baik oleh para pengumpul dan pengelola data disetiap tingkatan wilayah hingga pusat.

Persiapan Program Pendataan Keluarga 2015

tahapan persiapan dalam Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau adalah:

- 1. Persiapan Tingkat Provinsi**
- 2. Tingkat Kabupaten dan Kota**

Sosialisasi Program Pendataan Keluarga Tahun 2015

Kegiatan sosialisasi pada Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara sarasehan dan diseminasi. Sarasehan merupakan pertemuan yang diadakan untuk saling mendengarkan pendapat atau saran untuk memecahkan atau menuntaskan suatu masalah,

sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran program yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut.

Dalam pelaksanaan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta perangkat desa dan masyarakat melakukan sosialisasi diantaranya :

- a. Sarasehan di Tingkat Desa atau Kelurahan.
- b. Diseminasi di Tingkat Kecamatan.
- c. Diseminasi di Tingkat Kabupaten dan Kota.
- d. Diseminasi di Tingkat Provinsi.

Pelaksanaan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru

Pendataan Keluarga sangat penting karena dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan berbagai program pembangunan lainnya serta menjadi bagian dari fondasi pembangunan sumber daya manusia mandiri berkualitas.

Pelaksanaan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kader Pendata Tingkat RT
2. Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-KB Tingkat Kabupaten dan Kota
3. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Tingkat Provinsi
4. Pengumpulan dan Pelaporan
5. Pengolahan dan Output

Pengolahan hasil Pendataan Keluarga menggunakan metode Data Capture atau Data Entry (Validasi)

dengan Alih Daya memanfaatkan jasa pihak ketiga, hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tenaga dan sarana yang dimiliki. Setelah pengolahan hasil pendataan selesai dilakukan, maka akan didapatkan basis data keluarga Indonesia secara nasional.

Dalam sesi wawancara, Bapak M. Fikhri Johar sebagai Ketua Validator menjelaskan:

“Pekerjaan kami adalah memvalidasi form F1 yang diisi oleh masyarakat atau kader dari seluruh Riau. Validasi disini maksudnya adalah memperbaiki, mengoreksi, dan mengolah data yang masuk menjadi data bersih agar dapat lolos ke database nasional. Kami sebagai validator data merupakan sebuah tim yang terdiri dari 50 orang validator data online dan lebih dari 100 orang validator data offline. Perbedaan validator data online dan offline adalah, validator data online bekerja di kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau menggunakan komputer yang telah disediakan dengan menggunakan aplikasi OCR. Aplikasi ini memungkinkan validator langsung mengirimkan atau mengupload data yang sudah selesai divalidasi ke database nasional secara otomatis. 50 orang validator data online dibagi menjadi 3 shift, pagi, sore, malam dan bekerja non-stop agar deadline dapat tercapai. Sedangkan validator data offline merupakan validator data yang bekerja secara offline dengan format template yang telah ditentukan, validator offline dapat membawa pekerjaannya ke rumah dan nantinya data akan diupload ke database nasional oleh admin.”

Validator mengolah data yang diterima dari kader. Dalam proses ini, data yang masuk masih berupa data mentah dan merupakan tugas validator untuk memisahkan data yang layak untuk dijadikan database nasional. Bapak M. Fikhri Johar menjelaskan lebih lanjut :

“Data yang masuk beragam, ada yang sudah bersih dan ada juga data yang kotor. Maksud dari data bersih adalah data (form) tersebut sudah terbaca oleh sistem saat dilakukan scanning, jadi hanya sedikit yang perlu divalidasi. Data kotor merupakan data yang tak terbaca oleh sistem, data itulah yang harus divalidasi. Bentuk data yang kami terima kebanyakan data kotor, maksudnya banyak yang harus diperbaiki. Dari mulai tulisan tidak terbaca, kode wilayah yang tidak sesuai, form dalam keadaan kotor, dan kesalahan-kesalahan teknis lainnya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ronaldi Inand, S.Sos yang menyatakan :

“Ada beberapa data yang tidak akurat. Dan itu nanti yang akan diperbaiki oleh validator. Nantinya akan dipisahkan data yang bersih dan data yang kotor. Karena kalau data tidak valid, sistemnya sudah terkunci, jadi nanti data yang masuk tabulasi nasional sudah data bersih semua, jika yang diinput data kotor, akan otomatis ditolak oleh system tabulasi nasional. Tidak akan diterima validasi tersebut.”

secara umum pelaksanaan Program Pendataan Keluarga 2015 di Provinsi Riau. Terdapat 23% masyarakat Riau yang tidak terdata. Tidak terdata disini dapat terjadi dikarenakan data yang telah diambil ada, namun tergolong data yang kotor sehingga tidak lolos setelah divalidasi. Bapak Ronaldi mengungkapkan:

“Apapun yang terdapat pada formulir tersebut, kita tetap memasukkan semuanya terlepas dari benar atau salahnya data yang diisi oleh masyarakat. Valid atau tidaknya data tersebut juga tergantung dari pengolahannya”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa *output* yang dihasilkan tergantung dari bentuk data yang diinput dan proses sistem

komputerisasi. Data yang kotor atau tidak terbaca tidak akan lolos sebab sistem sendiri yang menolaknya. Selain sistem, masih banyak faktor-faktor yang membuat data yang didapat tidak mencapai seratus persen. Tentu saja salah satu faktornya adalah adanya masyarakat yang tidak terdata. Sekretaris Program Pendataan Keluarga mengakui hal tersebut:

“Dikarenakan masalah klise seperti keterbatasan, kelemahan dan kekurangan di sana-sini membuat tidak semua masyarakat terdata”

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, faktor lainnya yang berpengaruh terhadap efektifitas Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 adalah partisipasi masyarakat.

Efektivitas Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas organisasi dalam Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru melalui partisipasi masyarakat yang menggunakan perspektif sistem Steers (1986), yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. *Input* (masukan)

Input yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini adalah data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru yang disurvei oleh kader-kader dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau.

2. *Throughput* (proses)

Yakni merupakan proses pengolahan *Input* menjadi *output*. Proses penelitian yang akan berlangsung adalah proses pembuatan kebijakan yang akan diimplementasikan terhadap seluruh keluarga yang telah terdata.

3. *Output* (keluaran)

Merupakan hasil dari pekerjaan atau dari proses pemungutan. Pada penelitian ini maka *output* atau keluaran yang dihasilkan proses ini adalah pencapaian realisasi dan target yang ditetapkan.

Tujuan akhir yang diharapkan dari program Pendataan Keluarga Tahun 2015 meliputi Kemampuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Pendataan Keluarga Tahun 2015, tersedianya database yang diharapkan serta kemampuan meningkatkan keluarga sejahtera.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas data *output* yang menjadi database nasional dan daerah di Kota Pekanbaru sangat bagus, dikarenakan data tersebut adalah data bersih yang sudah lolos sistem yang ketat.

Hasil Rekapitulasi Keluarga Berencana dari Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa Rekapitulasi Keluarga Berencana di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru yang terdata dalam Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 adalah 77,5 %. Dari 240.888 Kepala Keluarga yang ada (data BPS Pekanbaru pada Bab I), hanya 201.205 Kepala Keluarga terdata dan 156.050 yang tervalidasi dan terkirim ke database pusat. Jumlah terendah adalah kecamatan Payung Sekaki dan yang terdata paling banyak adalah Kecamatan Pekanbaru Kota.

Hasil Rekapitulasi Tempat Pelayanan dan Unmet Need KB data yang masuk sebesar 70,92%. Selain itu dapat juga dilihat bahwa peserta KB di Kota Pekanbaru lebih memilih menggunakan pelayanan swasta sebesar 50,77% daripada menggunakan pelayanan KB milik pemerintah yang hanya sebesar 20,16%.

Unmet Need adalah kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi. Hanya

sedikit masyarakat Kota Pekanbaru yang mengisi data tersebut, hanya sekitar 15,5% data yang ada. Dari data yang minim ini, 6,7% masyarakat Kota Pekanbaru yang ingin menunda memiliki anak dan 8,7% tidak ingin memiliki anak lagi.

Hasil Rekapitulasi Tahapan Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru. Dari 240.888 KK di Kota Pekanbaru yang terdata, 958 KK atau sekitar 0,40% masyarakat yang berada pada golongan keluarga pra sejahtera. Hal ini dapat dikatakan kecil, karena tidak sampai 1% masyarakat yang berada pada golongan ini. Golongan keluarga sejahtera I berjumlah 29.201 atau 12,12% dari data yang masuk. Golongan keluarga sejahtera II berjumlah 96.964 atau 40,25%. Golongan keluarga sejahtera III berjumlah 83.222 atau 34,55% dan golongan keluarga sejahtera III+ berjumlah 30.543 atau 12,68%. Dari hasil rekapitulasi ini, dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru berada pada golongan keluarga sejahtera II.

PENUTUP

Penutup ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai Efektivitas Program Pendataan Keluarga di Kota Pekanbaru Oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015.

Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pelaksanaan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau mulai dari persiapan, sosialisasi, dan

pelaksanaannya belum berjalan maksimal, tepat waktu dan efektif.

2. Partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 dapat dikatakan cukup tinggi. Indikator partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari data yang diproses oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau yaitu sebesar 78%. Namun masih saja belum efektif jikalau belum mencapai target 100%. Masih banyak yang perlu dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan pelaksanaan program-program yang akan datang.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau dapat merealisasikan target yang ingin dicapai, yaitu tersedianya database demografi keluarga berupa database Keluarga Berencana dan database Tahapan Keluarga Sejahtera. *Output* ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hanya saja hasil yang didapat masih belum bisa dikatakan akurat, sebab tidak seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang terdata serta masih terdapat berbagai kesalahan dapat penginputan data yang diisi masyarakat saat divalidasi oleh bagian validator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Saran

1. Walaupun data *output* yang dihasilkan berkualitas, tetapi kelemahan dari sistem tersebut adalah tidak semua data penduduk Indonesia dan Kota Pekanbaru khususnya yang dapat terinput, karena tidak semua data tersebut bersih. Hal ini menunjukkan

bahwa data-data yang akan dijadikan database nasional tidak semua berasal dari seluruh penduduk Indonesia, atau Pekanbaru khususnya. Karena tidak meratanya data yang diinput. Kesimpulan data (rekapitulasi) yang diambil hanya merupakan data sebagian masyarakat, bukan seluruhnya. Hal tersebut tidak mempresentasikan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, dan Indonesia secara umum. Sebaiknya perlu ditingkatkan lagi jangkauan pengambilan data masyarakat hingga ke pelosok kota/daerah agar masyarakat atau data yang didapat mencapai seratus persen.

2. Perlunya ditingkatkan kembali sosialisasi pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar tidak lagi segan atau tabu untuk mengungkapkan tentang pemakaian KB kepada kader pendata agar data yang didapat maksimal dan tepat sasaran.
3. Setelah data demografi diperoleh, pemerintah Kota Pekanbaru harus segera mengambil langkah atau kebijakan selanjutnya agar masyarakat dapat menikmati hasil dari pelaksanaan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardian, Zu.1996.Perpajakan. Penertiban andi Offset, Yokyakarta.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Inu kencana: Jakarta.
- David Easton dalam Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*, PT. Raja
- Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Djam'an, MA dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Dwiyanti, L., 2005, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin Tahun 2005. Tesis, Pasca Sarjana Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Banjar Baru: Universitas Lampung Mangkurat.
- Gedeian, Arthur G. (1991). *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver.
- Hannan dan Freeman .1977. *New Perspective on Organizational Effectiveness, "a concept of applications and engineering but not of abstracts theory and research "*. University of Chicago Press: American Journal of Sociology.
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen, Pemasaran, Analisa Perilaku*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Z. 2012. *Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*. USU: Medan.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik. Graha Ilmu: Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2005). *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mardikanto, T. (2003). *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo : PUSPA

- Lubis, Hari dan Martani Huseini. (1987). *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI.
- Moleong, M.A, DR.lexy j, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mikkelsen, B., 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi,
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- PP No. 87 Tahun 2014 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Slamet, Margono, 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press.
- Soetomo., 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Riwu Kaho, MPA. Drs. Josef, 2002, *Pronspek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stoner, J.A.F., & Freeman, R.E. (1996). *Manajemen*. Alih Bahasa oleh Alexander Sindoro. Jakarta: Prenhalindo.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/7580/SJ Tanggal 19 Desember 2014 tentang *Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015*.
- Swedianti, Karina. 2011 *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*. Skripsi pada Program Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bogor: Dipublikasikan.
- Undang Undang No. 52 Tahun 2009 Pasal 49 Tentang *Perkembangan Kependudukan*.

Dokumen

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/7580/SJ Tanggal 19 Desember 2014 tentang *Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015*.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Pasal 49 Tentang *Perkembangan Kependudukan*.